

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan dual banking system. Walaupun perkembangan agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan Undang-undang Perbankan dengan UU No. 10 Tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk

meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang member izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS). Semenjak itu bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri (2002-2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2005-2009). Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Sedangkan tahap keempat mulai terbentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015). Pada tahun 2015 diharapkan perbankan syariah Indonesia telah memiliki pangsa yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang mensejahterakan masyarakat luas. Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia internasional.

Dengan strategi pengembangan yang dipilih, perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sector lain dengan prinsip syariah. Dukungan dari aspek hukum dan perundanga-undangan menjadikan pertumbuhan lembaga keuangan syariah semakin pesat karena telah memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas. Di samping itu, sektor keuangan syariah lain juga berkembang, seperti lembaga pembiayaan syariah.

4.1.1 Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia merupakan inisiator bisnis keuangan syariah lainnya antara lain; Asuransi syariah pertama (Asuransi Takaful), Dana pension lembaga keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), multifinance syariah pertama (Al-Ijarah Indonesia Finance).

Bank Muamalat Indonesia mendapatkan ijin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994 dan merupakan perusahaan publik namun tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia telah melakukan Penawaran

Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah di tahun 2003.

Dalam melakukan ekspansi bisnisnya, selain membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia juga membuka kantor cabang internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2009 dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia.

Bank Muamalat Indonesia memiliki serangkaian produk dan layanan, antara lain; produk Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia, produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diseluruh merchant VISA dalam dan luar negeri yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*.

Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-20, pada tahun 2012 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan logo baru (*rebranding*) untuk menampilkan bank syariah yang Islami, Modern dan Profesional. Pelopor perbankan syariah yang telah menginjak usia 23 tahun ini telah mendapatkan pengakuan dan berbagai penghargaan baik dari dalam negeri maupun internasional.

Pada Desember 2015, Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan melalui 446 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia dan

didukung oleh jaringan layanan 1.998 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (*mobile branch*) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Bank Muamalat Indonesia juga memberikan layanan pembiayaan syariah melalui anak perusahaan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF), layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat), layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Baitulmaal Muamalat.

4.1.2 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu

bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain dan mengundang investor asing. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi

PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

4.1.3 Sejarah Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001.

Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk merubah logo BSMI ke bentuk logo *sister company*-nya, yakni PT Bank Mega Tbk, namun

dengan skema warna yang berbeda. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia. Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Bank bekerjasama dengan MoneyGram International dalam hal pengiriman uang secara cepat. Pada tahun 2013, bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

4.1.4 Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/ DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.

4.1.5 Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah

Untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi Pt bank negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk unit usaha syariah (uus) bni pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada undang-undang no. 10 tahun 1998. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan yang lebih adil dan lebih tangguh dalam menghadapi tempaan krisis moneter tahun 1997. uus bni bermula dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin lalu berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang Pembantu.

Sesuai dengan corporate Plan uus bni tahun 2000, pada 19 juni 2010 Pt bank negara indonesia (Persero) tbk melakukan spin off atas uus bni dan meresmikan Pt bank bni syariah (“bni syariah atau bank”) sebagai bank umum syariah (bus) berdasarkan surat keputusan gubernur bank indonesia no. 12/41/keP.gbi/2010. realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya uu no. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (sbsn) dan uu no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Hingga akhir 2013 jumlah cabang bni syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang Pembantu, 17 kantor kas, 22 Mobil layanan gerak dan 20 Payment Point. selain itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang bni konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. di dalam pelaksanaan operasional perbankan, bni syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk bni syariah telah melalui pengujian dari dewan Pengawas syariah sehingga telah memenuhi aturan syariah.

4.1.6 Unit Usaha Syariah Bank Sinarmas

Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Sinarmas Tbk. Merupakan Unit Usaha Strategis dari PT. Bank Sinarmas Tbk. Yang menjalankan sistem Perbankan melalui kegiatan operasional sesuai dengan Prinsip Syariah. Kantor

Cabang Syariah pertama mulai beroperasi pada 18 November 2009 di Jakarta. Pendirian UUS bertujuan untuk melayani tingginya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan perbankan yang berbasis *dual banking system*, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah, dengan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, karena adanya Fatwa MUI tentang bunga bank.

4.1.7 Unit Usaha Syariah Bank Cimb Niaga

Perbankan Syariah merupakan segmen bisnis CIMB Niaga yang mengalami pertumbuhan kinerja cukup bagus di tahun 2015. Saat ini, CIMB Niaga Syariah masih merupakan unit usaha syariah dalam struktur organisasi bisnis CIMB Niaga. CIMB Niaga Syariah didukung dengan rangkaian produk dan layanan yang komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan semua segmen nasabah yang dilayani, mencakup 16 produk penghimpunan dana, 11 produk pembiayaan dengan 7 model pembiayaan, 8 produk dan layanan Card & Merchant Business, 9 produk Transaction Banking dan Trade Finance, dan 7 layanan Tresuri Syariah.

CIMB Niaga Syariah memiliki visi untuk “Menjadi Bank terpercaya di Indonesia, menjadi bagian dari jaringan universal banking terkemuka di Asia Tenggara, yang memahami kebutuhan nasabah, menyediakan solusi keuangan yang tepat dan komprehensif serta menjalin hubungan yang berkelanjutan”. visi besar tersebut dikembangkan lebih lanjut menjadi empat visi berikut

- a. Pada tahun 2018, CIMB Niaga Syariah bertujuan menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) terkemuka di Indonesia, memiliki kekhasan dalam budaya layanan, proses dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan proposisi perbankan universal yang kuat di tingkat domestik, dan menjadi model percontohan dalam penerapan *dual banking system* di Indonesia.
- b. Menjadikan Indonesia sebagai basis perkembangan bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari visi PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- c. Unggul dalam pengembangan bisnis dan akselerasi agenda integrasi ASEAN menuju Bank Umum Syariah terkemuka sebagai *anchor* dalam pengembangan perbankan di Indonesia melalui inovasi berkelanjutan, layanan konsumen berkualitas, dan praktik terbaik (*best practices*).
- d. Sebagai Perbankan Syariah terkemuka dengan layanan *digital banking* terbaik di industri.

4.1.7.1 Strategi dan Implementasi

CIMB Niaga Syariah telah menyusun serangkaian strategi yang terdiri dari strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang, rumusan dari strategi tersebut adalah:

a. Strategi Jangka Pendek

- Menguatkan *Frame Work Dual Banking Leverage Model* di semua unit *business* dan unit *support*.
- Meningkatkan porsi kontribusi Syariah *Business* di setiap *Business Segment* dengan penerapan KPI, *Training* Syariah secara terus menerus dan berkelanjutan, dan program *Campaign* Syariah *First*.

- Melengkapi fitur produk syariah yang lebih atraktif, berbagai varian skema syariah dengan keunggulan dan kemudahan.

b. Strategi Pangka Panjang

- Menyiapkan kerangka perbankan syariah yang kuat melalui pilar utama *Strategic Business Unit* (SBU).
- Membangun platform *syariah banking business* dengan mengimplementasikan *Dual Banking Leverage Model* (DBLM), dimana setiap SBU berperan sebagai pendorong dan mengelola operasi bisnis bersama CIMB Niaga Syariah untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi.
- Porsi kontribusi UUS sebesar 7,5% terhadap bisnis CIMB Niaga pada tahun 2018.
- Porsi kontribusi CIMB Niaga Syariah mencapai 20% terhadap bisnis CIMB Niaga pada tahun 2023.
- Menjadi Top 5 Industri Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2023.

4.1.8 Unit Usaha Syariah Bank Aceh

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta di dukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syari'ah maupun Kantor Cabangnya oleh Bank Konvensional,

maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan Unit Usaha Syari'ah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001.

Dengan terbitnya izin pembukaan kantor Cabang Syari'ah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syari'ah di Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Banda Aceh yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2004.

4.1.9 Unit Usaha Syariah Bank Kaltim

Wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah BPD Kaltim telah berkembang sejak dikeluarkannya UU no. 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah, yang kemudian wacana tersebut semakin kuat dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Bunga Bank Tahun 2003 dan dikeluarkannya PBI No.8/3/PBI/2006 yang memungkinkan membuka layanan syariah di kantor cabang konvensional.

BPD Kaltim Syariah secara resmi memulai operasinya pada tanggal 27 Desember 2006 berdasarkan surat izin Bank Indonesia No.8/7/DS/Smr. Pendirian unit usaha syariah merupakan cita-cita yang sudah lama dicanangkan oleh segenap jajaran BPD Kaltim. Setelah kurang lebih satu bulan soft opening, maka pada tanggal 30 Januari 2007 digelar acara Grand Opening BPD Kaltim Syariah yang secara resmi memperkenalkan kehadiran BPD Kaltim Syariah kepada masyarakat luas.

BPD Kaltim Syariah dengan motto “ Solusi Membawa Berkah” berkantor di jalan Achmad Yani nomor 31, menempati bangunan ruko berlantai 3 yang didesain dengan perpaduan warna hijau dan krem. Saat ini BPD Kaltim Syariah diperkuat oleh 21 personel. 10 orang di Unit Usaha Syariah dan 11 orang di kantor cabang Syariah Samarinda. Kehadiran BPD Kaltim Syariah diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi serta menggerakkan sektor riil sehingga kehadirannya dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga Kalimantan Timur pada umumnya.

